
Potensi Radikalisme Laten di Sekolah: Peran Minim Media dalam Isu Keagamaan

Deryl Ardica^{1*}, Meiliyana Nur Halijah²

¹Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

²Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Email Correspondence : deryldica99@gmail.com

Kata Kunci :

Media, Pendidikan
Karakter Sekolah,
Radikalisme

Abstrak

Artikel ini mengkaji fenomena meredupnya pemberitaan media terkait isu radikalisme di lingkungan sekolah dalam kerangka sejarah sosial keagamaan di Indonesia, serta implikasinya terhadap persepsi publik dan meningkatnya potensi pertumbuhan radikalisme laten yang bersifat tersembunyi. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, artikel ini menganalisis peran media dalam membentuk opini publik melalui mekanisme *agenda-setting* dan *framing*, serta dampaknya terhadap kewaspadaan masyarakat terhadap isu-isu strategis dalam pendidikan keagamaan. Temuan menunjukkan bahwa absennya pemberitaan mengenai radikalisme dapat menumpulkan kesadaran kolektif, padahal proses radikalisasi tetap berlangsung senyap melalui ruang digital, simbol-simbol religius, dan interaksi sosial yang eksklusif di sekolah. Keterbatasan sistemik seperti lemahnya literasi digital, minimnya pelatihan guru, serta rendahnya keterlibatan komunitas memperkuat kerentanan ini. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi preventif yang holistik dan terintegrasi, termasuk penguatan pendidikan karakter, reformasi kurikulum, pelatihan ideologis berkelanjutan bagi guru, serta pelibatan aktif media dan masyarakat. Artikel ini menegaskan pentingnya sinergi multiaktor dalam membendung radikalisme laten melalui pendekatan historis, kultural, dan institusional demi menjaga ketahanan ideologis generasi muda Indonesia.

Keywords :

Media, School Character
Education, Radicalism

Abstract

This article examines the decline in media coverage of radicalism in school environments through the lens of Indonesia's socio-religious history, and its implications for public perception and the growing potential for hidden, latent radicalism. Using a qualitative approach with literature review methods, this study analyzes the role of the media in shaping

public opinion through agenda-setting and framing mechanisms, and the impact of media silence on collective awareness of strategic religious and educational issues. Findings suggest that the decline in media reporting may weaken societal vigilance, even as radicalization continues quietly through digital spaces, religious symbols, and exclusive social interactions within schools. Systemic limitations—such as low digital literacy among teachers, insufficient ideological training, and weak community involvement—further exacerbate this vulnerability. Therefore, comprehensive and integrated preventive strategies are essential, including the strengthening of character education, curriculum reform, continuous teacher training on ideological moderation, and active collaboration with media and community stakeholders. This article underscores the importance of multi-actor synergy in countering latent radicalism through historical, cultural, and institutional approaches to safeguard the ideological resilience of Indonesia's younger generation.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Sejarah sosial keagamaan di Indonesia menunjukkan dinamika panjang hubungan antara pendidikan, agama, dan ideologi. Sejak masa kolonial, sekolah menjadi arena kontestasi wacana keagamaan dan ideologis yang terus berlangsung hingga hari ini. Dalam beberapa tahun terakhir, intensitas pemberitaan mengenai radikalisme khususnya yang berakar di sektor pendidikan dan lingkungan sekolah mengalami penurunan drastis yang mencolok. Padahal, sebelumnya isu ini sempat menempati posisi sentral dalam lanskap pemberitaan nasional, terutama pasca rangkaian aksi terorisme dan kekerasan berbasis ideologi yang mengguncang kesadaran kolektif publik.

Narasi tentang bahaya infiltrasi paham radikal ke dalam institusi pendidikan, khususnya di kalangan pelajar dan pendidik, pernah menjadi wacana dominan yang mewarnai diskusi media arus utama, forum akademik, dan percakapan daring di berbagai platform digital. Kini, seiring pergeseran perhatian publik dan redaksi media terhadap isu-isu lain yang dianggap lebih aktual atau strategis, wacana tersebut seakan menghilang dari permukaan: tidak lagi ramai diperbincangkan dalam berita, diskursus publik, maupun konten media sosial.

Fenomena tersebut tentu menimbulkan pertanyaan mendalam sekaligus krusial: apakah absennya narasi tentang radikalisme mencerminkan bahwa ancamannya memang telah benar-benar tersingkir dari ruang-ruang pendidikan, atau justru sebaliknya, radikalisme sedang bertransformasi ke dalam bentuk-bentuk baru yang lebih laten, subtil, dan sulit terdeteksi? Pertanyaan inilah yang menjadi pijakan utama dalam kajian kritis yang ditawarkan oleh artikel ini.

Sebagai aktor dominan dalam demokrasi modern, media memegang peran vital dalam membingkai realitas sosial dan membentuk persepsi publik terhadap isu-isu

strategis (Huda, 2019). Melalui perspektif teori agenda-setting yang dikembangkan oleh McCombs dan Shaw, ditegaskan bahwa media tidak hanya memengaruhi apa yang dipikirkan masyarakat, melainkan juga bagaimana dan seberapa penting suatu isu dipersepsikan dalam skema pemahaman publik (Ritonga, 2018).

Oleh karena itu, ketika isu radikalisme di sektor pendidikan tidak lagi mendapat sorotan utama dalam pemberitaan, hal ini berpotensi menciptakan ilusi kolektif bahwa ancaman tersebut telah surut, bahkan hilang. Padahal, kesimpulan semacam ini tidak serta merta dapat dijustifikasi secara empiris. Dalam konteks sekolah sebagai institusi pendidikan formal yang memainkan peran sentral dalam pembentukan identitas ideologis dan karakter generasi muda, kevakuman wacana publik mengenai radikalisme justru membuka ruang kosong yang sangat rentan untuk disusupi oleh narasi-narasi ekstrem yang eksklusif, intoleran, dan dalam banyak kasus, berujung pada praktik kekerasan simbolik atau bahkan fisik (Muchith, 2016).

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara kritis keterkaitan antara meredupnya sorotan media terhadap isu radikalisme dengan realitas faktual yang terjadi di lingkungan sekolah. Penelusuran difokuskan pada tiga rumusan masalah utama: (1) apakah penurunan intensitas pemberitaan media mencerminkan meredanya potensi ancaman radikalisme di sekolah? (2) bagaimana dinamika dan potensi pertumbuhan paham radikal dapat berlangsung secara senyap dalam iklim sosial yang tampak stabil dan bebas konflik? Serta (3) strategi-strategi preventif apa yang dapat diinisiasi oleh pihak sekolah secara mandiri untuk merespons tantangan ini tanpa harus menunggu alarm eksternal dari media massa?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka sebagai strategi utama pengumpulan data. Tidak dilakukan penggalian data primer, melainkan pemanfaatan sumber-sumber sekunder yang kredibel seperti jurnal ilmiah, buku akademik, laporan kebijakan pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat, serta artikel dari media massa. Pendekatan ini dipilih agar dapat memberikan pemahaman komprehensif dan mendalam mengenai radikalisme sebagai fenomena sosial yang adaptif dan senantiasa berevolusi seiring perubahan dinamika sosial-politik, termasuk dalam konteks mengisi kevakuman narasi publik akibat absennya liputan media.

Berangkat dari kerangka teori agenda-setting dan dilengkapi dengan pendekatan keamanan humanistik, artikel ini berupaya mengajukan kerangka berpikir baru dalam memahami radikalisme sebagai ancaman yang tidak selalu bersifat eksplisit. Radikalisme bisa berkembang melalui jalur non tradisional, tersembunyi di balik simbol-simbol keagamaan yang membius, dan menyebar melalui ruang-ruang interaksi sosial yang tampaknya netral. Dalam konteks ini, sekolah tidak cukup hanya menjadi objek pengawasan, tetapi harus mampu bertransformasi menjadi subjek aktif dalam menjaga ketahanan ideologis institusinya dengan cara membangun kesadaran kolektif, memperkuat pengawasan internal, serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan, kebinekaan, dan toleransi secara sistematis kepada seluruh elemen pendidik maupun peserta didik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) sebagai fondasi utama dalam konstruksi analisis. Pendekatan ini dipilih karena memiliki kesesuaian epistemologis yang tinggi dalam menelusuri, menggali, dan memaknai secara mendalam kompleksitas fenomena sosial, politik, dan kultural yang melingkupi isu radikalisme di lingkungan sekolah—terutama dalam konteks menghilangnya eksposur media terhadap isu tersebut. Dengan karakteristik yang bersifat deskriptif-analitis, penelitian ini tidak hanya berupaya menguraikan fenomena berdasarkan temuan naratif-konseptual yang tersedia, tetapi juga menganalisis keterkaitan antar unsur sosial secara sistematis melalui kerangka teori yang relevan dan teruji (Mahsun, 2013). Model ini memungkinkan peneliti untuk mengekstraksi makna-makna tersembunyi dari representasi media serta menelusuri pergeseran wacana publik secara kritis dan kontekstual.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sumber-sumber sekunder yang bersifat terverifikasi dan kredibel, mencakup jurnal ilmiah nasional dan internasional, literatur akademik berupa buku referensi atau hasil kajian teoretis, laporan penelitian serta kebijakan yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah dan non-pemerintah (termasuk LSM), hingga artikel berita dari media daring arus utama yang telah melalui proses verifikasi redaksional. Strategi pemilihan sumber dilakukan secara purposif, dengan kriteria utama berupa relevansi substansial terhadap tema radikalisme di sektor pendidikan serta peran media dalam membentuk atau mengabaikan konstruksi wacana publik. Dalam kerangka ini, hanya sumber-sumber yang memiliki otoritas akademik dan keterkaitan empiris yang dijadikan dasar dalam proses analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena minimnya pemberitaan media tentang radikalisme di sekolah selama beberapa tahun terakhir menghadirkan sebuah paradoks kritis yang tak dapat direduksi hanya pada asumsi bahwa ancaman radikalisme telah mereda atau tidak lagi relevan. Justru, kekosongan narasi publik ini perlu dibaca sebagai sinyal bahwa kita tengah menghadapi dinamika baru dari permasalahan lama yakni proses transformasi radikalisme dari bentuk yang kasat mata dan eksplisit menjadi bentuk yang lebih laten, tersembunyi, dan sulit dikenali secara langsung oleh publik maupun otoritas pendidikan. Radikalisme tidak lagi hadir dalam bentuk ujaran ekstrem di ruang terbuka atau aksi kekerasan fisik di lingkungan sekolah, melainkan bermigrasi ke bentuk simbolik dan virtual yang menyusup melalui materi daring, diskusi informal, jaringan tertutup, dan algoritma media sosial yang bersifat personal dan terkurasi (Fernando, 2021). Dengan kata lain, kita menyaksikan pergeseran arena penyebaran ideologi: dari ruang fisik ke ruang psiko-kultural dan digital yang jauh lebih kompleks serta sulit dimonitor.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar dan kritis: apakah absennya pemberitaan media tentang radikalisme di sekolah merupakan cerminan objektif dari stabilitas sosial dan keamanan ideologis, ataukah hanya sebetuk konstruksi semu ilusi stabilitas yang dihasilkan oleh narasi media yang menyempit, selektif, dan mungkin pula terkooptasi oleh agenda politik tertentu? Dalam logika semacam ini, keheningan media bukan hanya berarti ketiadaan informasi, melainkan juga bisa menjadi instrumen "pengaburan realitas" yang berbahaya, karena membuat publik dan pemangku kebijakan merasa aman secara semu. Ketidakhadiran isu radikalisme dalam ruang wacana publik juga dapat melemahkan upaya preventif karena tidak adanya tekanan sosial, politis, dan akademis untuk merespons dan mengantisipasi problem yang sesungguhnya masih berdenyut di bawah permukaan.

Lebih lanjut, pengabaian isu radikalisme di sekolah oleh media dapat memperlihatkan adanya pergeseran prioritas liputan ke isu-isu yang lebih "menguntungkan" secara politik atau komersial. Media, sebagaimana dijelaskan dalam teori agenda-setting, tidak netral dalam menyajikan informasi. Mereka turut membentuk struktur makna sosial dengan memilih isu mana yang ditonjolkan dan mana yang dihilangkan (Hadi S dkk., 2021). Maka, penting untuk membaca fenomena ini tidak hanya dari sudut pandang pendidikan, tetapi juga dari perspektif komunikasi politik dan sosiologi media. Kita harus bertanya: siapa yang diuntungkan dari hilangnya isu ini dalam pemberitaan? Apakah ini bentuk pengalihan perhatian? Ataukah media sedang menjadi bagian dari proses normalisasi dan desensitisasi masyarakat terhadap bahaya laten radikalisme?

Dalam kerangka itulah, pembahasan ini akan didalami melalui tiga fokus utama yang saling bertaut dan memperluas ruang analisis: (1) peran media dan relevansi teori agenda-setting dalam membentuk persepsi publik serta dinamika muncul-tenggelamnya isu radikalisme di ruang publik; (2) karakteristik adaptif dari gerakan radikal di lingkungan sekolah yang kian sulit dideteksi serta keterbatasan sistem pendidikan formal dalam menjawab tantangan ini; dan (3) strategi multi-level yang mencakup ranah kurikulum, pelatihan, komunitas, hingga kebijakan nasional dalam mendesain sekolah damai yang inklusif, toleran, dan berketahanan tinggi terhadap infiltrasi ideologi kekerasan. Analisis ini tidak hanya bertujuan mengurai kondisi saat ini, tetapi juga membongkar asumsi-asumsi tersembunyi yang melandasi narasi dominan, dan merumuskan pendekatan transformatif dalam membangun sistem pendidikan yang tangguh menghadapi perubahan zaman serta ancaman ideologis yang terus berevolusi.

Radikalisme dan Warisan Historis Keagamaan di Sekolah

Jejak-jejak keterlibatan kelompok keagamaan dalam dunia pendidikan di Indonesia bukanlah fenomena baru, melainkan bagian integral dari sejarah sosial bangsa ini. Sejak masa kolonial hingga era kemerdekaan, sekolah tidak hanya menjadi sarana transmisi ilmu pengetahuan, tetapi juga arena kontestasi ideologi dan penyemaian nilai-nilai keagamaan (Darajat, 2020).

Pendidikan Islam, baik dalam bentuk pesantren tradisional maupun madrasah modern, telah memainkan peran sentral dalam membentuk identitas kolektif umat serta mengonsolidasikan semangat kebangsaan dalam bingkai keimanan. Namun, dinamika historis tersebut tidak selalu berjalan linear dan harmonis.

Dalam lintasan sejarahnya, lembaga pendidikan keagamaan kerap berada dalam tarik-menarik antara arus purifikasi agama dan tuntutan modernitas. Di satu sisi, banyak sekolah Islam tampil sebagai agen moderasi yang menyuarakan nilai toleransi, kearifan lokal, dan nasionalisme religius (Baidhawry, 2019).

Di sisi lain, tidak sedikit pula yang secara sadar atau tidak terpengaruh oleh infiltrasi ideologi transnasional yang mengusung tafsir keagamaan eksklusif, rigid, bahkan politis. Hal ini menunjukkan bahwa ruang pendidikan, khususnya yang berbasis keagamaan, sangat rentan terhadap kontestasi wacana, terutama ketika krisis identitas generasi muda tidak ditangani secara komprehensif.

Transformasi sosial pascareformasi menjadi titik penting dalam membaca relasi antara radikalisme dan sekolah. Kebebasan berekspresi yang terbuka lebar sejak 1998 memberi ruang bagi tumbuhnya beragam ekspresi keagamaan di ranah publik termasuk di lingkungan sekolah. Namun, keterbukaan ini tidak selalu diimbangi dengan literasi ideologis yang memadai. Akibatnya, narasi-narasi keagamaan yang bersifat tekstualis dan apologetik mudah masuk ke ruang kelas, ekstrakurikuler, dan kelompok-kelompok rohani siswa. Hal ini diperparah oleh absennya pengawasan kultural yang sensitif terhadap dinamika keagamaan siswa, serta terbatasnya kemampuan guru dalam memahami konstruksi ideologi keagamaan yang berkembang secara digital.

Fenomena radikalisme laten yang menjangkiti sekolah hari ini tidak bisa dilepaskan dari warisan historis tentang bagaimana agama diposisikan dalam sistem pendidikan nasional. Sejak era Orde Baru, politik pendidikan agama diwarnai oleh pendekatan depolitisasi simbol-simbol Islam secara formal, namun sekaligus membuka ruang informal bagi berkembangnya kelompok-kelompok keagamaan dengan afiliasi ideologis yang beragam (Sarnoto, 2012). Warisan kebijakan ini menciptakan ambiguitas institusional, di mana sekolah secara struktural dituntut netral, tetapi secara kultural dibiarkan dikelola oleh aktor-aktor keagamaan yang tidak selalu memiliki orientasi moderat.

Kita juga tidak boleh mengabaikan fakta bahwa sebagian kelompok radikal justru mereproduksi wacana keagamaan mereka melalui saluran pendidikan yang sah. Mereka memanfaatkan simbol otoritas agama, kerinduan akan kesalehan, dan semangat perbaikan moral generasi muda untuk menyelipkan ideologi yang mengarah pada eksklusivisme dan delegitimasi terhadap kebinekaan. Dalam konteks ini, sekolah tidak cukup hanya dipahami sebagai tempat belajar formal, melainkan sebagai ruang kultural yang menyimpan memori kolektif keagamaan dan menjadi ladang strategis bagi pertempuran makna atas nilai-nilai Islam, kebangsaan, dan kemanusiaan.

Maka dari itu, upaya membendung radikalisme di sekolah tidak cukup hanya dengan pendekatan normatif atau administratif. Ia harus berakar dari pemahaman yang utuh tentang sejarah sosial keagamaan di Indonesia sejarah yang memperlihatkan betapa pendidikan agama bisa menjadi kekuatan pemersatu maupun alat pembelahan, tergantung bagaimana ia dikelola. Menghidupkan kembali khazanah keislaman yang inklusif, membumikan nilai-nilai wasathiyah (moderasi), serta mengkontekstualisasikan pendidikan agama dengan realitas sosial kultural kontemporer merupakan kunci untuk membangun ketahanan ideologis di lingkungan sekolah. Dalam hal ini, guru bukan hanya pengajar, tetapi juga penjaga warisan sejarah sosial keagamaan yang menentukan arah masa depan bangsa.

Peran Media dalam Membentuk Perspektif Publik

Media massa merupakan aktor strategis dalam pembentukan opini publik, berfungsi tidak sekadar sebagai penyampai informasi, melainkan sebagai institusi ideologis yang turut membentuk konstruksi realitas sosial melalui proses seleksi, penyusunan, dan representasi wacana tertentu (Santosa, 2017). Dalam hal ini, media memiliki kekuasaan simbolik yang besar, menentukan isu mana yang dianggap penting dan layak dibicarakan oleh masyarakat, serta membingkai bagaimana isu tersebut harus dipahami. Kerangka teori penetapan agenda yang diperkenalkan oleh McCombs dan Shaw (1972) mempertegas bahwa media bukan hanya memengaruhi Apa yang dipikirkan publik, melainkan juga bagaimana publik memikirkan sesuatu. Artinya, keputusan editorial untuk memprioritaskan atau mengabaikan isu tertentu secara langsung berdampak pada pembentukan kesadaran kolektif dan prioritas sosial masyarakat.

Dalam konteks radikalisme di sekolah, penurunan intensitas pemberitaan bukan berarti ancamannya menghilang secara substansial. Justru sebaliknya, absennya isu ini dari sorotan media dapat menimbulkan efek desensitisasi publik terhadap bahaya laten yang mungkin sedang berkembang dalam ruang-ruang pendidikan. Seperti dikemukakan oleh Entman (2007), praktik Framing media sangat dipengaruhi oleh variabel-variabel struktural seperti tekanan politik, kepentingan ekonomi, atau strategi redaksional yang dikalkulasi (Suriati, 2021). Dengan demikian, tidak adanya pemberitaan tentang radikalisme bisa jadi merupakan refleksi dari proses depolitisasi isu yang dianggap sensitif, kontroversial, atau potensial menimbulkan friksi sosial terutama dalam konteks politik identitas yang kian menguat di ruang publik Indonesia pasca 2017. Di sisi lain, media juga bisa terjebak dalam narasi dominan negara yang cenderung menghindari eskalasi isu radikalisme di sekolah demi mempertahankan kesan stabilitas sosial.

Kecenderungan ini semakin kompleks di era digital, di mana lanskap komunikasi publik telah berubah secara fundamental. Media tradisional kini kehilangan monopoli dalam produksi dan distribusi informasi; dominasi algoritma dan platform digital telah melahirkan ekosistem baru yang memungkinkan ideologi ekstrem menyebar melalui jalur tidak konvensional. Seperti dijelaskan oleh Conway

(2017), proses radikalisisasi kini bergerak ke ruang-ruang privat seperti grup WhatsApp, kanal Telegram, forum daring tertutup, serta jejaring video atau podcast yang bersifat buatan pengguna, yang sebagian besar tidak terjangkau oleh pengawasan media arus utama maupun aparat negara (Indra Wijaya, 2020). Dengan demikian, absennya pemberitaan media bukan hanya menyulitkan deteksi publik terhadap fenomena radikalisme, tetapi juga menandai munculnya "ancaman tak terlihat" (ancaman tak terlihat), yakni bentuk ekstremisme yang bersembunyi di balik tirai algoritma, personalisasi informasi, dan privatisasi ruang digital.

Akibat dari situasi ini adalah terbentuknya kesenjangan antara persepsi sosial dengan kenyataan struktural. Masyarakat awam cenderung mengasumsikan bahwa isu radikalisme tidak lagi relevan karena tidak muncul di media, padahal hal tersebut lebih mencerminkan absennya narasi daripada absennya masalah. Ketika persepsi publik dibentuk berdasarkan keterlihatan di media, maka isu yang tidak terlihat cenderung diabaikan oleh kebijakan, pendidikan, dan advokasi sosial (Paskarina & Saifullizam, 2025). Dalam kerangka ini, media bukan hanya bertanggung jawab atas apa yang diberitakan, tetapi juga atas konsekuensi dari apa yang tidak diberitakan. Ketimpangan narasi inilah yang berisiko menciptakan kebijakan yang bersifat reaktif alih-alih preventif, karena tidak disandarkan pada peta ancaman yang akurat dan berimbang.

Oleh karena itu, dalam konteks pencegahan radikalisme di sekolah, penting untuk mengkritisi relasi antara media, wacana, dan kebijakan (Tawaang & Mudjiyanto, 2021). Perlu ada upaya sadar dari aktor-aktor media, akademisi, serta pembuat kebijakan untuk tidak membiarkan absennya liputan berarti berakhirnya isu. Transparansi liputan, keberagaman sumber, serta keberanian media untuk menggali lapisan-lapisan tersembunyi dari ancaman radikalisme sangat diperlukan dalam membangun sistem deteksi dini berbasis kesadaran publik yang sehat dan partisipatif (Sabiruddin, 2019). Jika media gagal dalam menjalankan fungsi ini, maka kita berisiko kehilangan satu instrumen strategis dalam upaya menjaga ruang pendidikan dari infiltrasi ideologi ekstrem yang terus berevolusi dan beradaptasi secara diam-diam.

Karakter Adaptif Radikalisme di Sekolah dan Keterbatasan Institusi Pendidikan

Radikalisme, sebagai bentuk ekstremisme ideologis, memiliki karakteristik yang sangat adaptif, elastis, dan mampu menyelinap dalam berbagai ruang sosial termasuk sekolah dengan menyesuaikan diri terhadap perubahan konteks sosiokultural, politik, dan teknologi (Asrori, 2019). Radikalisme tidak lagi hadir dalam bentuk yang gamblang seperti ujaran kebencian secara terbuka atau simbol-simbol kekerasan yang kasatmata, melainkan melalui mekanisme simbolik dan naratif yang lebih halus dan tersembunyi. Di lingkungan sekolah, yang secara normatif dirancang sebagai arena pembentukan nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan kebhinekaan, ideologi radikal sering memanfaatkan celah-celah struktural dan kultural yang belum terkelola secara optimal (Budiman dkk., 2024)

Fenomena ini bisa dilihat dari munculnya aktivitas-aktivitas informal seperti kajian keagamaan eksklusif yang tidak terpantau, diskusi tertutup antar siswa yang menyebarkan wacana intoleransi, hingga sirkulasi materi digital melalui platform seperti WhatsApp, Telegram, dan YouTube yang berisi narasi kebencian atas nama agama. Proses ini berlangsung secara diam-diam namun sistematis, membentuk gelembung ideologis dalam ruang pendidikan yang semestinya netral. Adaptasi radikalisme ini juga ditopang oleh kemampuan kelompok-kelompok tertentu untuk membungkus pesan-pesan intoleran dengan simbol-simbol keagamaan yang normatif, sehingga sulit dibedakan antara ajaran agama yang sah dengan penyimpangan ideologis bermuatan politis (Ghifari, 2017).

Keterbatasan institusi pendidikan dalam menghadapi gejala ini menjadi tantangan serius. Guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya pada umumnya belum dibekali dengan pemahaman mendalam tentang pola-pola radikalisme serta cara mendeteksi tanda-tanda awalnya. Menekankan bahwa deteksi dini terhadap radikalisme memerlukan pelatihan khusus, literasi digital yang memadai, dan sensitivitas terhadap narasi-narasi eksklusif yang menyusup melalui media sosial. Sayangnya, kebanyakan program pendidikan guru di Indonesia masih belum menjadikan isu radikalisme sebagai bagian dari kurikulum strategis (Abdullah Darraz, 2013). Hal ini mengakibatkan banyak pendidik bersikap reaktif atau bahkan tidak menyadari bahwa proses radikalisme tengah berlangsung di antara murid-muridnya.

Selain itu, pengawasan sekolah terhadap aktivitas daring siswa juga sangat terbatas. Di era digital ini, proses internalisasi nilai-nilai radikal lebih banyak berlangsung di ruang virtual tempat otoritas sekolah kehilangan kendali dan kapasitas intervensi. Siswa dengan mudah dapat mengakses konten keagamaan yang ekstrem melalui kanal media sosial yang bersifat personal dan tertutup, di mana proses indoktrinasi berlangsung melalui video, ceramah, atau diskusi daring yang tidak diawasi siapa pun. Ruang digital yang bersifat "ruang gema" memungkinkan penguatan keyakinan tanpa kritik atau perspektif lain, sehingga mempercepat proses radikalisme bahkan pada usia yang sangat muda.

Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya partisipasi aktif orang tua dan komunitas sekitar sekolah dalam membentuk sistem kewaspadaan kolektif. Banyak orang tua yang menyerahkan sepenuhnya proses pendidikan moral dan agama kepada sekolah, tanpa menyadari bahwa anak-anak mereka juga membentuk nilai dan identitasnya dari interaksi di luar kelas terutama di dunia maya. Ketika sekolah dan keluarga gagal bersinergi, maka ruang kosong itu akan diisi oleh aktor-aktor luar yang membawa agenda ideologis radikal dengan kemasan religius yang tampak meyakinkan.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah adanya kecenderungan sebagian tenaga pendidik atau figur keagamaan di sekolah (seperti guru agama atau pembina rohis) yang secara tidak sadar menjadi saluran bagi narasi intoleransi. Tanpa kontrol ideologis yang ketat, ruang-ruang edukatif justru dapat dimanfaatkan sebagai saluran penyebaran doktrin eksklusif yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan

kebhinekaan. Dalam banyak kasus, radikalisme berkembang bukan karena kekuatan ideologinya semata, melainkan karena kelemahan institusi dalam membangun sistem deteksi dan respons yang responsif dan progresif (Berger, 2018).

Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa tantangan radikalisme di sekolah tidak bisa diatasi hanya dengan kebijakan administratif seperti larangan simbol atau pengawasan kegiatan keagamaan. Diperlukan pendekatan struktural dan kultural yang melibatkan reformulasi kurikulum, pelatihan guru secara berkala, peningkatan literasi digital siswa, serta penguatan peran komunitas sekolah secara menyeluruh. Sekolah harus dikembangkan bukan hanya sebagai tempat belajar kognitif, tetapi sebagai ruang sosial yang mampu merawat perbedaan, mengembangkan daya kritis, dan memperkuat imunitas terhadap ideologi-ideologi yang merusak kohesi sosial.

Strategi Pencegahan dan Desain Sekolah Damai

Menghadapi kompleksitas ancaman radikalisme yang kian adaptif dan tersembunyi, upaya pencegahan tidak dapat lagi bersifat reaktif, sektoral, atau berbasis insiden. Strategi yang dibutuhkan haruslah menyeluruh, holistik, dan bersifat jangka panjang, dengan mengintegrasikan unsur pendidikan, penguatan kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi. Desain sekolah damai (sekolah damai) bukan hanya retorika normatif, tetapi harus direalisasikan sebagai kerangka strategis yang menanamkan nilai kebhinekaan, toleransi, dan resolusi konflik secara aktif dan berkesinambungan. Dalam kerangka ini, terdapat lima dimensi strategis yang saling melengkapi:

1. Pendidikan Karakter sebagai Basis Ketahanan Ideologis

Pendidikan karakter menjadi fondasi utama dalam membangun daya tahan ideologis siswa terhadap narasi intoleran. Bukan sekadar menanamkan nilai-nilai moral secara kognitif, pendidikan karakter harus menyentuh ranah afektif dan konatif, yaitu dengan mendorong praktik nyata nilai-nilai seperti empati, gotong royong, dan keadilan dalam keseharian sekolah (Santoso, 2022). Pendidikan karakter efektif ketika diterapkan secara terintegrasi dalam semua mata pelajaran, aktivitas ekstrakurikuler, serta budaya sekolah secara keseluruhan. Pembiasaan perilaku positif dalam komunitas sekolah merupakan mekanisme internalisasi yang jauh lebih efektif dibanding ceramah normatif. Dalam konteks ini, sekolah perlu menghindari pendekatan dogmatis, dan sebaliknya, mengedepankan pendidikan nilai yang reflektif, kontekstual, dan berbasis pada kehidupan sosial riil siswa.

2. Pelatihan Guru sebagai Penjaga Narasi Kritis

Guru memegang posisi strategis sebagai gatekeeper pengetahuan dan nilai (Faiz, 2022). Oleh karena itu, kapasitas guru dalam mengenali gejala radikalisasi sejak dini menjadi krusial. menegaskan bahwa peran guru bukan sekadar

menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga sebagai penjaga narasi sosial di dalam kelas. Pelatihan intensif yang mencakup literasi ideologis, deteksi dini radikalisme, resolusi konflik, dan penguatan perspektif kebinekaan sangat dibutuhkan. Guru juga harus diberikan pemahaman tentang perkembangan digital dan algoritma media sosial yang dapat mempengaruhi pola pikir siswa. Dengan demikian, guru tidak hanya menjadi pendidik, tetapi juga fasilitator nilai, mentor ideologis, dan pengawas wacana dalam ruang pendidikan yang aman dan inklusif.

3. *Pemanfaatan Teknologi untuk Mengimbangi Ekspansi Radikalisme Daring*

Radikalisme di era digital berkembang pesat di ruang-ruang virtual yang sulit dijangkau secara manual. Oleh karena itu, sekolah harus mampu mengimbangi arus informasi tersebut dengan strategi digital yang konstruktif. Penggunaan platform daring seperti website sekolah, media sosial resmi, serta kanal YouTube edukatif bisa dijadikan sarana untuk menyebarkan konten alternatif yang mempromosikan perdamaian, toleransi, dan keragaman (Alfi dkk., 2023). Teknologi juga bisa dimanfaatkan sebagai alat Sistem Peringatan Dini, misalnya dengan menggunakan sistem monitoring perilaku daring siswa (dengan tetap menjaga etika privasi) atau penguatan ruang diskusi daring yang terbuka dan sehat. Alih-alih membiarkan siswa mencari informasi ideologis secara bebas di ruang maya, sekolah perlu menyediakan kanal resmi dan terpercaya sebagai rujukan nilai dan identitas.

4. *Keterlibatan Komunitas dan Orang Tua dalam Pencegahan Kolektif*

Sekolah tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi tantangan radikalisme. Keterlibatan aktif orang tua, tokoh masyarakat, dan organisasi lokal sangat penting dalam menciptakan ekosistem ketahanan atau ekosistem ketahanan kolektif. Menekankan pentingnya modal sosial dalam menjaga kohesi sosial di komunitas (Indrawadi dkk., 2022). Dalam konteks ini, sekolah perlu membangun forum komunikasi yang reguler dengan orang tua, membuka ruang dialog lintas nilai, serta melibatkan masyarakat dalam program sekolah seperti kegiatan budaya, kajian kebangsaan, atau pelatihan pengasuhan toleran. Upaya ini bukan hanya memperkuat pengawasan sosial terhadap siswa di luar sekolah, tetapi juga memperluas tanggung jawab pencegahan radikalisme secara horizontal.

5. *Kerjasama Multisektor sebagai Pilar Sinergi Nasional*

Radikalisme adalah masalah lintas sektoral yang menuntut respons kolektif dari berbagai institusi. Dalam kerangka ini, kerjasama antara sekolah, pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga keagamaan, LSM, dan dunia akademik harus diperkuat melalui platform koordinatif yang solid. Pendekatan multisektor memungkinkan terbentuknya kebijakan yang saling melengkapi antara

pendekatan edukatif, yuridis, dan kultural (Rusyidi dkk., 2019). Misalnya, pemerintah dapat memfasilitasi pelatihan guru melalui dinas pendidikan, sementara aparat keamanan dapat menyediakan data potensi ancaman di wilayah tertentu secara preventif. LSM dan universitas juga dapat berperan dalam riset, pengembangan modul moderasi beragama, serta advokasi kebijakan publik yang lebih inklusif. Kolaborasi ini penting agar kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri, dan pendekatan deradikalisasi tidak hanya bersifat represif tetapi juga transformatif.

Implikasi dari Minimnya Pemberitaan Media: Ancaman Tersembunyi dan Ilusi Stabilitas

Minimnya pemberitaan media mengenai radikalisme di lingkungan sekolah membawa konsekuensi serius terhadap persepsi dan kesiapsiagaan publik. Dalam perspektif teori agenda-setting, absennya isu dalam ruang pemberitaan dapat menyebabkan deprioritization atau turunnya urgensi isu di mata publik dan pembuat kebijakan. Akibatnya, perhatian terhadap isu radikalisme dianggap tidak relevan atau sudah selesai, padahal pada kenyataannya proses radikalisasi bisa saja semakin laten dan tidak terdeteksi. Jaringan radikal yang berkembang secara senyap justru lebih sulit diintervensi dan memiliki dampak jangka panjang yang merusak tatanan sosial secara mendalam (Budijanto & Rahmanto, 2021).

Dalam konteks ini, sekolah sebagai garda depan dalam pencegahan radikalisme harus tetap waspada meski tidak ada sorotan media. Kesiapsiagaan tidak boleh didasarkan pada narasi media semata, melainkan harus dibangun melalui sistem internal yang kokoh, sinergi komunitas yang kuat, serta kebijakan pendidikan yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Pencegahan tidak boleh menunggu krisis terjadi; ia harus menjadi bagian integral dari visi pendidikan yang berorientasi pada perdamaian dan keadilan sosial secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Fenomena menghilangnya pemberitaan media mengenai radikalisme di sekolah bukanlah pertanda bahwa ancamannya telah sirna, melainkan mengindikasikan terjadinya transformasi bentuk dan arena penyebaran ideologi radikal yang kini lebih tersembunyi, laten, dan digital. Dalam konteks ini, keheningan media bukanlah sekadar absennya informasi, tetapi bisa menjadi alat pengaburan realitas yang menciptakan ilusi stabilitas, membungkam kesadaran publik, dan melemahkan respons kebijakan yang preventif terhadap radikalisme di lingkungan pendidikan. Peran media sangat strategis dalam membentuk persepsi publik melalui mekanisme *agenda-setting* dan *framing*, yang dalam kasus ini berkontribusi terhadap hilangnya tekanan sosial-politik untuk menangani ancaman ideologis di sekolah.

Padahal, jika ditelusuri dalam perspektif sejarah sosial keagamaan di Indonesia, sekolah telah lama menjadi arena strategis dalam kontestasi nilai, identitas, dan ideologi keagamaan. Dinamika antara pendidikan dan ideologi bukanlah fenomena

baru, melainkan bagian dari sejarah panjang interaksi masyarakat Indonesia dengan agama, negara, dan media. Dalam lanskap kontemporer, radikalisme kini bermigrasi ke ruang digital, menggunakan algoritma, simbol keagamaan, serta jejaring tertutup yang tidak terjangkau oleh pengawasan media arus utama maupun otoritas pendidikan.

Karakter adaptif radikalisme juga memanfaatkan kelemahan institusi pendidikan yang belum siap secara struktural dan kultural untuk mendeteksi serta merespons infiltrasi ideologi intoleran. Lemahnya literasi digital guru, terbatasnya pelatihan khusus, serta minimnya sinergi antara sekolah, keluarga, dan komunitas menciptakan ruang kosong yang diisi oleh narasi-narasi eksklusif dan radikal yang dibungkus secara halus dan terkadang tampak normatif.

Oleh karena itu, pencegahan tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan strategi komprehensif melalui penguatan pendidikan karakter, reformulasi kurikulum yang inklusif, pelatihan guru yang berkelanjutan, serta pelibatan aktif masyarakat dalam membangun kesadaran kolektif. Sekolah harus menjadi ruang damai yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan nilai toleransi, kebhinekaan, dan ketahanan ideologis. Selain itu, media harus dikembalikan pada fungsinya sebagai pilar demokrasi yang kritis, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengawal isu-isu keagamaan dan pendidikan yang berdampak pada masa depan generasi bangsa.

Singkatnya, tantangan radikalisme di sekolah hari ini tidak lagi terletak pada kekerasan yang nyata, tetapi pada diamnya sistem yang abai, serta pudarnya ingatan kolektif akan akar sejarah sosial dan keagamaan dari persoalan ini. Maka, menghadapi bahaya laten ini, diam adalah bentuk pembiaran. Yang dibutuhkan adalah kesadaran kolektif lintas sektor, intervensi strategis, dan keberanian untuk membongkar kenyamanan semu yang diciptakan oleh narasi dominan demi masa depan pendidikan yang damai dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfi, A. M., Febriasari, A., & Azka, J. N. (2023). Transformasi Pendidikan Agama Islam Melalui Teknologi. 2(4). <https://doi.org/10.55606/religion.v1i4.249>
- Asrori, S. (2019). Mengikuti Panggilan Jihad: Argumentasi Radikalisme dan Ekstremisme di Indonesia. *Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 4(1). <http://dx.doi.org/10.30984/ajip.v4i1.911>
- Baidhawry, Z. (2019). Dinamika Radikalisme dan Konflik Bersentimen Keagamaan di Surakarta. *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 3(02), 43. <https://doi.org/10.32332/riayah.v3i02.1319>
- Berger, J. M. (2018). *Extremism*. The MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/11688.001.0001>
- Budijanto, O. W., & Rahmanto, T. Y. (2021). Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal HAM*, 12(1), 57. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.57-74>

- Budiman, A., Al-afghani, M. T., & Sansayto, M. A. (2024). Menanggulangi Ekstremisme melalui Pendidikan Agama: Strategi untuk Mendorong Moderasi di Sekolah. *Aksiologi: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.47134/aksiologi.v5i1.210>
- Darajat, Z. (2020). Warisan Islam Nusantara. *Buletin Al-Turas*, 21(1), 77–92. <https://doi.org/10.15408/bat.v21i1.3827>
- Darraz, M. A. (2013). Radikalisme dan Lemahnya Peran Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Maarif Institute*, 8(1). <https://maarifinstitute.org/jurnal-maarif/>
- Faiz, A., & Purwati. (2022). Peran Guru dalam Pendidikan Moral dan Karakter. *Jurnal Education and development*, 10(2), 315–318. <https://doi.org/10.37081/ed.v10i2.3671>
- Fernando, H. (2021). Representasi Simbolik: Makna Radikalisme dalam Media Sosial Instagram. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 15(1), 106. <https://doi.org/10.17977/um020v15i12021p106-124>
- Ghifari, I. F. (2017). Radikalisme di Internet. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, 1(2), 123. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v1i2.1391>
- Hadi S, I. B., Pratiwi Kurniawan, E., & Irwansyah, I. (2021). Agenda Setting dalam Isu-Isu Kontemporer di Seluruh Dunia. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(1), 105–119. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.188>
- Huda, A. Z. (2019). Melawan Radikalisme Melalui Kontra Narasi Online. *Journal of Terrorism Studies*, 1(2). <https://doi.org/10.7454/jts.v1i2.1007>
- Indra Wijaya, T. (2020). Peran Manipulasi Informasi Terhadap Keikutsertaan Perempuan dalam Gerakan Terorisme. *Journal of Terrorism Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.7454/jts.v2i1.1019>
- Indrawadi, J., Moeis, I., Montessori, M., Wirdanengsih, W., Fatmariza, F., Asmil, A. D., & Hafsyari, H. (2022). Penguatan Kohesi Sosial Melalui Peran Aktif Masyarakat Seberang Palinggam. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 333–339. <https://doi.org/10.24036/abdi.v4i2.229>
- Mahsun, A. (2013). Pendidikan Islam dalam Arus Globalisasi: Sebuah Kajian Deskriptif Analitis. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 8(2), 259–278. <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.2.259-278>
- Muchith, M. S. (2016). Radikalisme dalam Dunia Pendidikan. *ADDIN*, 10(1), 163. <https://doi.org/10.21043/addin.v10i1.1133>
- Paskarina, C., & Saifullizam, S. S. (2025). Paparan Media dan Dampaknya Terhadap Persepsi Publik. *SosioGlobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 9(2). <https://doi.org/10.24198/jsg.v9i2.62871>
- Ritonga, E. Y. (2018). Teori Agenda Setting dalam Ilmu Komunikasi. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 4(1), 32. <https://doi.org/10.31289/simbollika.v4i1.1460>
- Rusyidi, B., Fedryansyah, M., & Mulyana, N. (2019). Pekerjaan Sosial dan Penanganan Terorisme. *Sosio Informa*, 5(2), 128–142. <https://doi.org/10.33007/inf.v5i2.1765>

- Sabiruddin, S. (2019). Saring sebelum Sharing, Menangkal Berita Hoax, Radikalisme di Media Sosial. *Al Munir: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 2(1), 22–40. <https://doi.org/10.15548/amj-kpi.v2i1.486>
- Santoso, B. (2022). Nilai-Nilai Karakter dalam Hadis Rasulullah SAW dan Implikasinya terhadap Pendidikan Karakter di Indonesia. *Mauizhah: Jurnal Kajian Keislaman*, 1–36.
- Sarnoto, A. Z. (2012). Konsepsi Politik Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Educhild*, 1(1). <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/540>
- Suriati. (2021). Dakwah dan Hedonisme. *Retorika : Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 3(1), 1–27. <https://doi.org/10.47435/retorika.v3i1.577>
- Tawaang, F., & Mudjiyanto, B. (2021). Mencegah Radikalisme Melalui Media Sosial. *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, 2(2). <https://jkd.komdigi.go.id/index.php/mkm/article/view/4521>